KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Triwulan I 2024

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Kami juga turut berterima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Kelautan dan Perikanan atas arahan dan bimbingan selama ini dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Pada tahun anggaran 2024, kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri selain dilaporkan secara triwulanan juga secara tahunan sebagai akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan. Laporan Kinerja ini mencakup realisasi dan capaian atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja untuk Triwulan I tahun 2024 serta analisis dan rencana tindak lanjut untuk triwulan-triwulan berIKKtnya.

Dalam pengejewantahan kinerja 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 Sasaran Kegiatan yang dikonkretkan ke dalam 17 butir Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di tahun 2024 hasil proses *cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Jenderal.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja ini kami sadari masih jauh dari sempurna, untuk itu koreksi dan saran yang membangun dari setiap pembaca kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 24 April 2023
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo

ISI

KATA PENGANTAR i
ISI ii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
Pendahuluan 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
Isu Strategis 3
BAB II PERENCANAAN KINERJA 4
Kegiatan 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 6
IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik 9
IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik 11
IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik 13
IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan 14
IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan 16
Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. 17
IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti 19
IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 22
IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional 24
IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan 27
IK 10 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 28
IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 29
IK 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 30
IK 13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 31
IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 32
IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 33

IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 34
IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Mendapatkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 35
BAB IV PENUTUP 36
Kesimpulan 36
Saran 36
LAMPIRAN 37
Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)..... 2
Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjaku Triwulan I 2024 untuk akun Biro HKLN 7
Gambar 3 *Screen capture* aplikasi kinerjaku untuk output kinerja Biro HKLN Triwulan I 2024..... 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan I tahun 2024 2
Tabel 2 Daftar IKK dan besar target Biro HKLN tahun 2024 dan Triwulan I 2024 5
Tabel 3 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2024 6
Tabel 4 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik 9
Tabel 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 9
Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik 11
Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 11
Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik 13
Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 13
Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I 2024 14
Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2022 14
Tabel 12 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan... 16
Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 16
Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I 2024 19
Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 19
Tabel 16 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023 22
Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 22
Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional 24
Tabel 19 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 24
Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan 27
Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 27
Tabel 22 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2023 28
Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 28
Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024 29
Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 29
Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024 30

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 30
Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan I 2024 31
Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 31
Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024 32
Tabel 31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 32
Tabel 32 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2024 .. 33
Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 33
Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 34
Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023 34
Tabel 36 Realisasi dan Capakan IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Triwulan I 2024 35
Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tw I 2017 s.d. 2023 35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai koordinator dan fasilitator penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana di Peraturan Menteri tersebut turut diatur tata organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang proporsional, efektif, efisien dan berorientasi birokrasi kelas dunia.

Keberadaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki arti strategis karena secara timbal balik berperan sebagai komunikator dan pengelola hubungan baik secara horizontal yaitu antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *counterpart* dari negara asing mitra Indonesia dan organisasi kerja sama regional dan internasional, maupun secara vertikal dimana Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri berfungsi sebagai penjembatan arus infomasi dari Menteri kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masyarakat atau publik luas dan menghimpun permohonan informasi masyarakat melalui media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dalam merelasikan dan diseminasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan rumusan jajaran pimpinannya kepada publik eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan baik di dalam dan di luar negeri serta kepada publik internal turut memiliki nilai strategis.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada Triwulan I tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mengemban 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dituangkan ke dalam 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rangka pemenuhan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah. Jumlah IKK yang realisasinya dapat diukur pada Triwulan I 2024 adalah sebanyak 7 (tujuh) IKK yaitu:

1. Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
2. Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti;
4. Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional;
6. Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar; dan
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) yang merupakan aplikasi resmi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk perencanaan kinerja, pemantauan dan pelaporan hasilnya, skor kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi Biro HKLN pada triwulan I 2024 adalah 109,60. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Biro HKLN memperoleh predikat baik.

BAB I
PENDAHULUAN

Pendahuluan

Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) Triwulan I Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama triwulan I tahun 2024 (tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2024). Selain memuat pencapaian kinerja, Laporan Kinerja Biro HKLN tahun 2023 juga memuat pertanggungjawaban atas realisasi anggaran yang telah digunakan. Penyusunan Laporan Kinerja Biro HKLN Triwulan I Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro HKLN dalam rangka meningkatkan kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja bermanfaat untuk digunakan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun *progress* dan pengumpulan capaian kinerja dilakukan secara berkala oleh seluruh unit kerja lingkup Biro HKLN dengan cara menyampaikan pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unit setiap triwulan kepada pengelola kinerja Biro HKLN. Selanjutnya, pengelola kinerja melaporkan pencapaian kepada Biro Perencanaan dan Sekretariat Jenderal KKP melalui system yaitu aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) secara online. Pembahasan atas realisasi dan capaian kinerja triwulanan dan tahunan juga dilakukan oleh dengan pimpinan unit kerja di Biro HKLN sembari berkoordinasi dan berkonsultasi dengan ketua dan anggota Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yang dapat diidentifikasi setidaknya adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja;
- Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja;
- Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan;
- Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja untuk periode menengah dan Panjang; dan
- Sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana kinerja triwulan dan atau tahun berikutnya.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Terhitung dari tanggal 29 September 2020, struktur organisasi Biro HKLN berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Biro HKLN terdiri atas Kepala Biro HKLN dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas Biro HKLN adalah untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

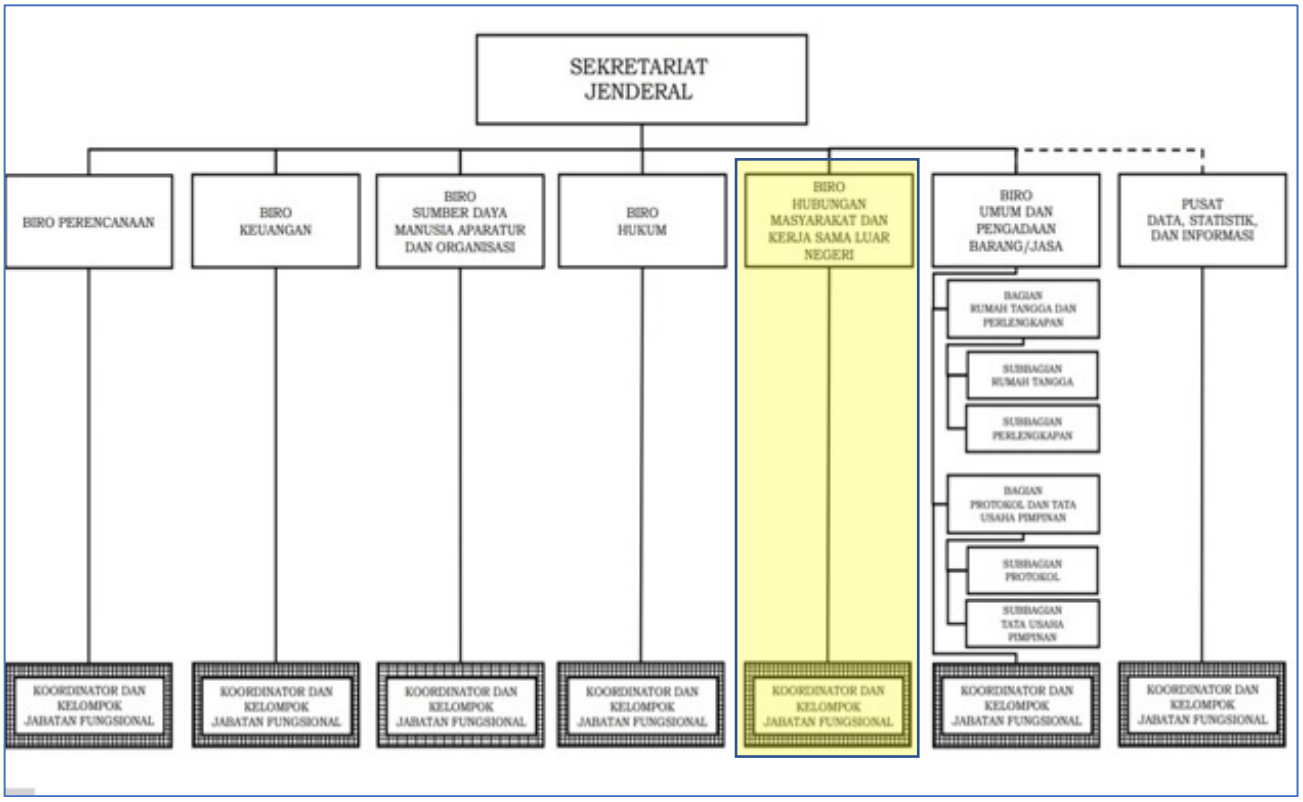

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro HKLN (dalam kotak kuning)

Sumber Daya Manusia Biro HKLN pada Triwulan I tahun 2024 berjumlah 71 pegawai dengan rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Jabatan/Tim Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Biro HKLN	1
2	Pemberitaan dan Opini Publik	28
3	Layanan Informasi Publik	6
4	Kerja Sama Bilateral	7
5	Kerja Sama Regional dan Multilateral	9
6	Dukungan Manajerial	16
7	Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan	8
8	Diperbantukan	1
Jumlah		76

Tabel 1 Jumlah pegawai Biro HKLN Triwulan I tahun 2024

Sebagai unit kerja di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretariat Jenderal KKP, Biro HKLN tidak memiliki Visi dan Misi tersendiri melainkan mengadopsi tugas, fungsi, visi dan misi Sekretariat Jenderal KKP. Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berikut:

- penyelenggara koordinasi pelaksanaan tugas,
- pembinaan, dan
- pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP yang diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan visi dari Sekretariat Jenderal KKP adalah sebagai berIKKt:

"Penggerak Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik menuju Terwujudnya Visi KKP".

Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal KKP mengemban peran penting sebagai motor penggerak utama dalam pelaksanaan dan pembinaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dukungan manajemen di lingkungan KKP. Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Jenderal tersebut, rumusan misi Sekretariat Jenderal KKP adalah:

1. Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan dukungan manajemen, dan
2. Penguatan budaya organisasi di lingkungan KKP.

Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa isu strategis (strategic issue) adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi atau instansi pemerintah. Dengan demikian, Biro HKLN menetapkan bahwa isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Biro HKLN. Adapun isu strategis yang telah diidentifikasi sehingga menjadi fokus perhatian Biro HKLN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama internasional (bilateral, regional dan multilateral) dalam sektor kelautan perikanan seperti pemberantasan IUU Fishing, dan peningkatan volume dan pangsa ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berbasis kepada Blue Economy;
2. Citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Pencapaian seluruh program prioritas KKP di tahun 2024 dan kontribusi yang dapat diberikan Biro HKLN;
4. Keterbatasan SDM dan kebijakan pemerintah terkait pembatasan pengadaan pegawai secara nasional; dan
5. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dan mental serta reformasi birokrasi KKP.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan Biro HKLN (pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri yang efektif), sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri ditindaklanjuti yang efektif. Indikator Kinerja Utama (IKK) yang harus dicapai diantaranya adalah '5.Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan'. Dalam melaksanakan kegiatannya, Biro HKLN pada tahun anggaran 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 37.486.550.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima lima puluh ribu rupiah).

Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Tahun 2024

Sasaran kegiatan merupakan kondisi ideal yang diharapkan draih oleh Biro HKLN sebagai suatu hasil seluruh indikator yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan Biro HKLN. Untuk mencapai tujuan Biro HKLN Tahun 2024 maka sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional;
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri.

Guna mencapai sasaran kegiatan di atas maka seluruh sasaran kegiatan tersebut diturunkan dan dimaterialisasi ke dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang pengukurannya dapat dilakukan secara kuantitatif. Hal ini dapat memberi kita ukuran keberhasilan dan pencapaian target kinerja dimana keseluruhannya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja memuat Sasaran Kinerja dan butir-butir IKK merupakan instrumen pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sekaligus merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan tanggung jawab/kinerja.

Detil IKK Biro HKLN tahun 2024 dan target IKK Triwulan I 2024 tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Target Tw I
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	0
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	0
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	0
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	89%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	15%
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	15%
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	88%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	0
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	0
		11	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	0
		12	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	0
		13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	94%
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	0
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	0
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	0

Tabel 2 Daftar IKK dan besar target Biro HKLN tahun 2024 dan Triwulan I 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Realisasi dan Capaian Kinerja

Perencanaan, monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan serta pengumpulan data kinerja di lingkup Biro HKLN dilakukan oleh Sub Koordinator Tata Usaha Biro HKLN dengan menggunakan aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id), aplikasi resmi pengelolaan kinerja di KKP yang dikelola Biro Perencanaan. Proses penghitungan kinerja didasarkan kepada formula yang tercantum pada manual IKK masing masing IKK yang telah ditetapkan Kepala Biro HKLN. Realisasi dan capaian kinerja Biro HKLN periode triwulan I tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Gambar berikutnya adalah *screen capture* aplikasi kinerjaku per tanggal 23 April 2024 dimana berdasarkan hasil penghitungan oleh aplikasi, Nilai Kinerja Biro HKLN triwulan I tahun 2024 adalah 109,60.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Target Tw I	Realisasi Tw I	Capaian Tw I
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	96,9	0	-	-
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP	93,3	0	-	-
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	94	0	-	-
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan	89%	89%	94,44%	106,11%
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88	88	91,81	104,33%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti	95%	15%	50%	120%
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional	93%	15%	22,86%	120%
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	88%	88%	88,61%	100,69%
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan	100%	0	-	-
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	84	0	-	-
		11	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	85	0	-	-
		12	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	0	-	-
		13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94%	94%	100%	100%
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100%	100%	100%
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	95%	0	-	-
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri	100%	0	-	-
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi	75	0	-	-

Tabel 3 Realisasi dan Capaian IKK Biro HKLN Triwulan I 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	**Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum**						105,23			105,23		
IKSK.01	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96,90	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.02	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,30	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.03	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.04	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89,00	89,00	94,44	106,11	89,00	94,44	106,11	16-Apr-2024 14:07
IKSK.05	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✔	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	91,81	104,33	88,00	91,81	104,33	16-Apr-2024 14:07
SK.02	**Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Bidang Kerja Sama Internasional**						113,56			113,56		
IKSK.06	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	15,00	50,00	120,00	15,00	50,00	120,00	16-Apr-2024 14:07
IKSK.07	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	88,61	100,69	88,00	88,61	100,69	16-Apr-2024 14:07
IKSK.08	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	15,00	22,86	120,00	15,00	22,86	120,00	16-Apr-2024 14:07
IKSK.09	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
SK.03	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri**						110,00			110,00		
IKSK.10	Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.12	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.13	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	94,00	133,33	120,00	16-Apr-2024 14:07
IKSK.14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Data Dukung1 ✔ Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16-Apr-2024 14:07
IKSK.15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri Tambah Data Dukung	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07
IKSK.17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Mendapatkan Predikat Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tambah Data Dukung	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 14:07

Tutup

Gambar 2 *Screen capture* aplikasi kinerjaku Triwulan I 2024 untuk akun Biro HKLN

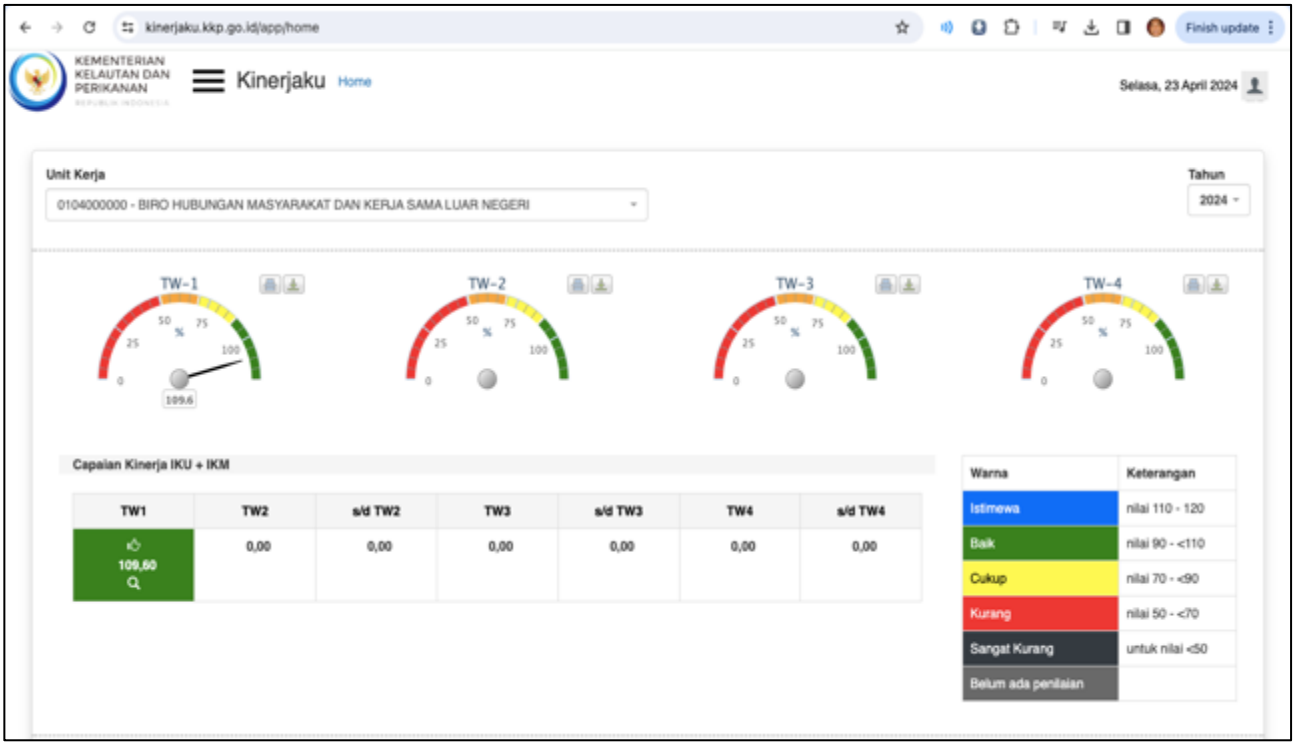

Gambar 3 *Screen capture* aplikasi kinerjaku untuk output kinerja Biro HKLN Triwulan I 2024

Metode analisis mengacu kepada rekomendasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berIKKt:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2024
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dengan triwulan I tahun 2023
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024)
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada) merupakan penjelasan apabila terdapat pemeringkatan yang diterbitkan oleh KL Penilai posisi/peringkat KKP secara nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan: berisi tentang penyebab keberhasilan ketercapaian/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya/kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai target IKK selama triwulan I tahun 2024.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya: Penggunaan sumber daya baik anggaran dan SDM serta sumber daya lainnya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi/kolaboratif program dan kegiatan untuk mencapai IKK baik antar unit kerja/KL maupun instansi dan kembaga terkait.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja berisikan tentang kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian.
8. Untuk IKK yang bersifat tahunan, tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja dengan menyampaikan progres kegiatan pendukung yang telah dilakukan di triwulan I dengan dilengkapi dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK.

IK 1 Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	nihil	nihil	Belum

Tabel 4 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dimana pada Triwulan I 2024 tidak ditetapkan besar target untuk IKK ini. Sumber informasi besar Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Republik Indonesia. Besar Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

a. Pengelolaan layanan produksi; dan
b. Publikasi produksi video documenter.

Maka, sepanjang triwulan I tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

a. monitoring media sosial dengan 3.908 data di twitter, 599 data di instagram, 1.784 data di facebook, 242 data di tiktok, dan 347 data di youtube;
b. monitoring media massa dengan 7.725 pemberitaan di media online, 39 pemberitaan di media cetak, dan 1 pemberitaan di media tv;
c. 7 kali konferensi pers
d. Rilis 107 siaran pers;
e. Produksi 4 episode podcast dan 3 episode KKP News
f. Publikasi 2 berita terkait KKP melalui media; dan
g. Penyusunan 10 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
    1) Strategi Komunikasi “Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut”
    2) Strategi Komunikasi “Kebijakan Pengelolaan Benih Bening Lobster”
    3) Strategi Komunikasi “Kebijakan Tata Kelola LKR (Lobster, Kepiting, Rajungan)”
    4) Strategi Komunikasi “Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi”
    5) Strategi Komunikasi “Peningkatan Angka Konsumsi Ikan”
    6) Strategi Komunikasi “Udang Sebagai Komoditas Unggulan”
    7) Strategi Komunikasi “Kampung Nelayan Modern”
    8) Strategi “Peluncuran Satelit Nano Bawah Laut Cakra-1”
    9) Strategi Komunikasi “Pelaksanaan Modelling Penangkapan Ikan Terukur”
    10) Strategi Komunikasi “Modelling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan”

Dan, terkait dengan publikasi produksi video documenter, telah dilaksanakan

a. Produksi video Sinematik ekonomi biru;
b. Produksi video Plesir pesisir di Dewi Bahari Padak Guar; dan
c. Produksi Plesir pesisir wisata kuliner lobster.

Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, tidak terdapat kendala serius di internal Biro HKLN seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, peralatan dan pendanaan. Adapun faktor yang ternyata menjadi masalah adalah faktor eksternal yaitu cuaca di lokasi produksi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan video. Oleh karena itu sebagai antisipasi ke depannya sehingga guna meminimalisasi hambatan eksternal jenis tersebut adalah dengan melakukan pengecekan prakiraan cuaca di lokasi pengambilan video.

Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik baru menjadi IK Biro HKLN di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan terhadap hasil IK serupa di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya. Juga, tidak dapat dilakukan pembandingan realisasi Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik triwulan I 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024). Perlu ditekankan bahwa tidak diketahui telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam pencapaian target IKK ini.

IK 2 Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	nihil	nihil	Belum

Tabel 6 Realisasi dan Capaian IK Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Indikator Kinerja baru di tahun 2024 dimana pada Triwulan I 2024 tidak ditetapkan besar target untuk IKK ini. Sumber informasi besar nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Republik Indonesia. Besar nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik dihitung dan diolah oleh Kementerian Kominfo berdasarkan data yang dikumpulkan (diantaranya dari seluruh oleh Kementerian dan Lembaga) oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2023 dan diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen rencana aksi pencapaian target Perjanjian Kinerja Biro HKLN tahun 2024, kegiatan pendukung Biro HKLN yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Indeks PIKP KKP terdiri dari:

a. Pengelolaan layanan produksi; dan
b. Publikasi produksi video documenter.

Maka, sepanjang triwulan I tahun 2024, dalam rangka pengelolaan layanan produksi telah dilaksanakan kegiatan seperti:

a. monitoring media sosial dengan 3.908 data di twitter, 599 data di instagram, 1.784 data di facebook, 242 data di tiktok, dan 347 data di youtube;
b. monitoring media massa dengan 7.725 pemberitaan di media online, 39 pemberitaan di media cetak, dan 1 pemberitaan di media tv;
c. 7 kali konferensi pers
d. Rilis 107 siaran pers;
e. Produksi 4 episode podcast dan 3 episode KKP News
f. Publikasi 2 berita terkait KKP melalui media; dan
g. Penyusunan 10 strategi komunikasi Kebijakan dan Isu sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
    1) Strategi Komunikasi “Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut”
    2) Strategi Komunikasi “Kebijakan Pengelolaan Benih Bening Lobster”
    3) Strategi Komunikasi “Kebijakan Tata Kelola LKR (Lobster, Kepiting, Rajungan)”
    4) Strategi Komunikasi “Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi”
    5) Strategi Komunikasi “Peningkatan Angka Konsumsi Ikan”
    6) Strategi Komunikasi “Udang Sebagai Komoditas Unggulan”
    7) Strategi Komunikasi “Kampung Nelayan Modern”
    8) Strategi “Peluncuran Satelit Nano Bawah Laut Cakra-1”
    9) Strategi Komunikasi “Pelaksanaan Modelling Penangkapan Ikan Terukur”
    10) Strategi Komunikasi “Modelling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan”

Dan, terkait dengan publikasi produksi video documenter, telah dilaksanakan

d. Produksi video Sinematik ekonomi biru;
e. Produksi video Plesir pesisir di Dewi Bahari Padak Guar; dan
f. Produksi Plesir pesisir wisata kuliner lobster.

Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik baru menjadi IK Biro HKLN di tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan pembandingan terhadap hasil IK serupa di tahun 2023 dan di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu tidak dapat dilakukan pembandingan realisasi Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik triwulan I 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Setjen (Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024). Diyakini bahwa tidak pernah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya baik berupa anggaran maupun sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam pencapaian target IKK ini.

IK 3 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 8 Realisasi dan Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 9 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2024, belum ada baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Jadwal atau periode penghitungan IKK bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IK ini. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IK ini. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai).

Diperkirakan, kegiatan-kegiatan di bawah ini merupakan bagian dari progres kinerja kerangka pelaksanaan IKK sampai akhir triwulan I 2024:

- Memantau dan mencermati laporan dan bahan evaluasi IKK yang sama di tahun 2021, 2022 dan 2023 sehingga diperoleh rekomendasi perbaikan kinerja kepada tim kerja Layanan Informasi Publik Biro HKLN; dan
- Melakukan persiapan seprima mungkin

IK 4 Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
89%	94,44%	106,11%	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

Tabel 10 Realisasi dan Capaian IK Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2022

Indikator Kinerja Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan mulai dikenalkan oleh Biro HKLN pada triwulan II 2024. Oleh karena dalam data pada kedua tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa tidak ada realisasi IK Biro HKLN ini pada triwulan I tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada triwulan I tahun 2024, telah ada realisasi IK ini yaitu sebesar 94,44% dan oleh karena target IK adalah 89% maka capaiannya menjadi (94,44% / 89%) x 100% = 106,11%.

Persentase Efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah angka atau besaran persentase efektifitas yang besarnya diperoleh dari penilaian oleh stakeholder melalui pengisian kuisioner. Sepanjang Triwulan I 2024 telah dilakukan beberapa kali penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online (menggunakan aplikasi google forms survey) untuk layanan hubungan lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) pada kegiatan kunjungan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manual IK telah menentukan efektifitas layanan hubungan lembaga yaitu dengan mengacu kepada matriks di bawah ini.

% Efektifitas Layanan	Kinerja Layanan
25,00 - 64,99	Tidak Efektif
65,00 - 76,60	Kurang Efektif
76,61 - 88,30	Efektif
88,31 - 100,00	Sangat Efektif

Maka berdasarkan matriks di atas, kinerja layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat efektif karena persentase efektifitas berada dalam rentang 88,31% sampai dengan 100%.

Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IKK ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk IKK ini.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK ini yang dapat diidentifikasi adalah:

- Pengalaman tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan selama bertahun-tahun memberikan layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dan mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi;
- Proses belajar yang tanpa henti dan kejenuhan dari tim kerja Hubungan Kemitraan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan.
- Dukungan anggaran yang memadai untuk tim Hubungan Kemitraan dalam menyediakan layanan yang prima dalam bidang hubungan kelembaga kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan;
- Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim Hubungan Kemitraan dalam berimprovisasi dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang hubungan kelembaga kepada mitra kerja Biro HKLN di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran Biro HKLN yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.

HIngga akhir Triwulan I tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi yang spesifik dengan pihak eksternal Biro HKLN. Data dukung berisi hasil survey dan berkas berisi hasil survey yang telah diolah datanya data untuk mendapatkan realisasi persentase efektifitas di atas dapat dilihat dalam tautan https://bit.ly/49LRA6s.

IK 5 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88	91,81	104,31%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 12 Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 13 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diintroduksi Biro HKLN pada triwulan II tahun 2023. Kepuasan layanan dilakukan melalui survei pelayanan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan perpustakaan KKP dengan metode penyebaran kuesioner (secara online). Selanjutnya dilakukan pengukuran dengan skala likert dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam pengukuran Skala Likert, nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" yang dilekatkan kepada setiap unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah unsur
Diketahui jumlah bobot = 1 sedangkan jumlah unsur = 9 (jumlah unsur yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Ke-9 unsur survey pelayanan Perpustakaan KKP disampaikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia?
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
5. Apakah produk hasil layanan perpustakaan yang Saudara terima telah sesuai dengan standar pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku Pustakawan dalam memberikan pelayanan?
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana perpustakaan?
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan? (email, media sosial perpustakaan)

Bobot nilai tertimbang ditentukan oleh Perpustakaan tidak berbeda antar unsur atau merata sehingga bobot nilai tertimbang semua unsur = 1/9 = 0,11. Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai SKM = SKM x 25

Penentuan mutu pelayanan dan kinerja Perpustakaan KKP mengacu kepada tabel di bawah ini yang disediakan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari penyebaran kuisioner sepanjang Triwulan I 2024, terdapat 38 responden yang terdiri dari 12 orang pria dan 26 orang wanita. Ke 38 responden tersebut menerima layanan yang jenisnya diantaranya adalah:

- Layanan anak;
- Layanan penelusuran informasi;
- Layanan keanggotaan; dan
- Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian koleksi)

Tabulasi hasil pengolahan survey yang dilakukan Perpustakaan tabel dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.

	Unsur								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah	132	135	133	151	138	138	140	142	147
Rata-rata	3,47	3,55	3,50	3,97	3,63	3,63	3,68	3,74	3,87
Bobot	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
Rata rata x bobot	0,39	0,39	0,39	0,44	0,40	0,40	0,41	0,42	0,43
Nilai indeks IKM	3,67								
Nilai indeks IKM x 25	91,81								

Oleh karena itu, realisasi nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan KKP pada Triwulan I 2024 adalah 91,81.

Dengan target pada Triwulan I sebesar 88 maka capaian IKK ini adalah:

Capaian = (realisasi / target) x 100% = (91,81 / 88) x 100% = 104,33%

Mengacu kepada tabel penentuan mutu pelayanan dan kinerja yang disediakan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka kinerja Perpustakaan KKP adalah 'Sangat Baik' karena besar Nilai Indeks SKM x 25 adalah 91,81 dan masuk ke dalam kisaran 88,31 – 100.

Raw data hasil dan hasil pengolahan survey kepuasan pelayanan Perpustakaan KKP pada Triwulan I 2024 dapat dilihat dalam tautan https://bit.ly/440uK9E. Pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IKK ini. Sejauh ini, belum pernah ditemukan terdapat acuan tingkat nasional apalagi internasional untuk IKK ini.

Penyebab keberhasilan Biro HKLN melalui tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam memenuhi target IKK ini yang dapat diidentifikasi adalah:

- Pengalaman para pejabat fungsional Pustakawan dan pegawai perpustakaan yang sudah bertahun-tahun memberikan layanan perpustakaan kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan dan mengatasi setiap masalah yang mungkin selama ini terjadi;
- Proses belajar yang tanpa henti dan kejenuhan dari tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam mengevaluasi dan memperbaiki layanan.
- Dukungan anggaran yang memadai untuk tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam menyediakan layanan yang prima dalam bidang perpustakaan kepada *customer* perpustakaan KKP untuk literasi bidang kelautan dan perikanan;
- Arahan dan kepercayaan pimpinan Biro HKLN yang tidak pernah disia-siakan oleh tim kerja tim kerja Komunikasi Kelembagaan dan Perpustakaan dalam berimprovisasi dan memberikan layanan prima semaksimal mungkin dalam bidang perpustakaan kepada para customer perpustakaan KKP; dan
- Kelengkapan peralatan dan suasana perkantoran perpustakaan KKP yang kondusif, bersahabat sehingga membentuk sinergi dan kolaborasi internal yang efektif.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2024, diyakini tidak ada terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik personil maupun keuangan untuk memenuhi target IKK ini kendati tidak ada kolaborasi tertentu dengan pihak eksternal Biro HKLN.

IK 6 Persentase kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
15%	50%	120%	25%	57,69%	120%	nihil	nihil	Belum

Tabel 14 Realisasi dan Capaian IK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	25%	57,69%

Tabel 15 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

IKK Persentase Dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti merupakan Indikator Kinerja yang baru dikenalkan Biro HKLN pada tahun 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama' dengan target di triwulan I 2024 sebesar 15%.

Pada tahun 2024, terdapat 18 dokumen kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang akan ditindaklanjuti. Adapun nama dari 18 dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. MoU Development of Blue Economy Through Marine Affairs and Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Tanzania);
2. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of The Socialist Republic of Viet Nam and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Of Indonesia on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Vietnam);
3. Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel between Govt. Indonesia and the Govt of Spain (kerja sama dengan negara Spanyol);
4. Letter of Intent on the Bilateral Maritime Dialogue (BMD) RI-Prancis serta Joint Statement on Developing Indonesia-France Marine and Fisheries Cooperation Programme (kerja sama dengan negara Perancis);
5. Mutual Recognition Agreement (MRA) on Quality of Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bergen pada tanggal 1 Oktober 2022 (kerja sama dengan negara Norwegia);
6. Perjanjian kerja sama Ocean for Development Programme antara KKP dan NORAD (kerja sama dengan North American Aerospace Defense Command (NORAD) dari negara Amerika Serikan dan Kanada);
7. Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of The United Arab Emirates (kerja sama dengan negara Persatuan Emirat Arab)
8. MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Arab Saudi (kerja sama dengan negara Arab Saudi);
9. Extension of the MoU on Maritime Cooperation between The Govt of RI and the Govt of the USA (kerja sama dengan negara Amerika Serikat);

10. MoU on Economic Cooperation and Capacity Building Between the EFTA States and Indonesia (kerja sama dengan European Free Trade Association dari negara Islandia, Liechtenstein, Norwegia and Swiss);
11. the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, as regards matters related to readmission (kerja sama dengan negara Uni Eropa);
12. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Economic and Technical Cooperation (kerja sama dengan negara Rusia);
13. Letter Of Intent Between The Fish Quarantine And Inspection Agency Of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Of The Republic Of Indonesia And The National Fisheries Products Quality Management Service Of The Ministry Of Oceans And Fisheries Of The Republic Of Korea On The Development Of Sanitary And Phyto-Sanitary Electronic Certification (Sps E-Certification) System For Fish And Fishery Products (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
14. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Natural Resources of The People's Republic of China on Marine Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok);
15. Implementing Arrangement between Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia and The Ministry of Agriculture and Rural Affairs of The People's Republic of China on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok)
16. Implementing Arrangement for The Establishment of a Korea-Indonesia Offshore Research Cooperation Center between The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and The Ministry of Oceans and Fisheries of The Republic of Korea (kerja sama dengan negara Korea Selatan);
17. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia in respect of The Common Guidelines concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (kerja sama dengan negara Malaysia);
18. Memorandum of Understanding between The Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam and The Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia on Fisheries Cooperation (kerja sama dengan negara Vietnam).

Hingga akhir triwulan I 2024, dari 18 dokumen kerja sama 9 diantaranya telah ditindak lanjut. Oleh karena itu, berdasarkan formula berikut:

%KS Bilateral = (Jumlah dokumen yang ditindaklanjuti/Jumlah dokumen KS yang aktif) x 100%
Keterangan:

- Jumlah dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti adalah dokumen yang merupakan hasil tindak lanjut dokumen kerja sama bilateral yang aktif.
- Jumlah dokumen kerja sama yang aktif adalah dokumen kerja sama bilateral yang masih berlaku dan direncanakan akan ditindaklanjuti pada tahun 2024.

Maka realisasi indikator kinerja 'Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti' pada triwulan I 2024 adalah:

Realisasi % KS Bilateral = (9 / 18) x 100% = 50%

Target indikator kinerja ini pada triwulan I 2024 adalah 15% maka capaian adalah:

(realisasi / target) x 100% = (50% / 15%) x 100% = 333,33%

Oleh karena besar capaian melebihi 120% maka aplikasi kinerjaku menghitung dan menetapkan capaian IK ini di triwulan I 2024 sebesar 120%. Dokumen yang berisi informasi yang lebih lengkap seperti daftar dan jadwal kegiatan tindak lanjut kerja sama bilateral sepanjang triwulan I 2024 dan tautan data dukung dokumen tindak lanjut dapat diakses melalui tautan berikut: https://bit.ly/3WkvswX pada sheet 'IK Bilateral'.

Realisasi IK ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dirasa Jdak oleh karena capaian baru sampai dengan akhir triwulan I 2023. IKK ini Jdak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu Jdak bisa dilakukan pembandingan. Pencapaian target IK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena itu Jdak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

IK 7 Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
88%	88,61%	100,69%	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Belum

Tabel 16 Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2024, telah tersedia besar realisasi dan capaian Biro HKLN untuk IK Indeks Kepuasan terhadap layanan pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP. Hal ini dikarenakan penghitungan IK di tahun 2024 bersifat triwulanan. Akan tetapi pada triwulan yang sama di tahun 2023, belum ada hasil penghitungan IKK ini karena Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2023 dan di tahun 2023 frekuensi penghitungannya masih bersifat tahunan.

Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP adalah angka atau besaran dalam satuan persen yang dideduksi dari kepuasan para *stakeholder*/pengguna jasa layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP yang disediakan oleh Biro HKLN sepanjang triwulan I 2024. Untuk mengetahui persentase kepuasan, Biro HKLN melakukan penyebaran dan pengumpulan kuisioner secara online pada triwulan I 2024 memakai aplikasi google forms survey.

Daftar pertanyaan yang disampaikan dalam kuisioner adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana? dan
9. Bagaimana pendapat Anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?

Hasil pengolahan atas persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP periode triwulan I 2024 adalah sebesar 88,61%. Hasil ini diperoleh dari 20 orang responden yang mengisi dan menyerahkan kuisioner. Oleh karena target Indikator Kinerja ini di triwulan I 2024 sebesar 88% maka capaian Indikator Kinerja ini sebesar:

Capaian = (realisasi / Target) x 100% = (88,61% / 88%) x 100% = 100,69%

Kuisioner juga menghimpun umpan balik dari para responden dalam bentuk masukan guna perbaikan dan apresiasi layanan perjalanan dinas luar negeri oleh Biro HKLN. Beberapa respon dari responden diantaranya:

- Untuk dipertahankan;
- Lebih ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan u/ kemudahan para PIC PDLN dalam menjalani tugas pimpinan dan amanah yang diberikan kpd masing-masing PIC PDLN;
- Secara umum pelayanan sudah sangat baik, jika ada yang cukup atau kurang mungkin hanya *case-by-case* saja, dan masih wajar;
- Pelayanan sangat baik dan ramah;
- Layanan PDLN sudah sangat mudah dan baik;
- Pelayanan sudah sangat baik dan sangat cepat tanggap terkait dengan informasi apa saja yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan perjalanan dinas luar negeri;
- *Keep up the good work!*
- Sudah sangat baik;
- Pengusulan SP Setneg dilakukan sesegera mungkin karena masih harus mengurus exit permit, sehingga dapat pergi dengan paspor biru yg sudah lengkap ditempel exit permit.

Apabila mengacu kepada tabel di bawah ini yang diambil dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 maka, dengan realisasi sebesar 88,61%, mutu pelayanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP triwulan I 2024 adalah sangat baik atau berkinerja sangat baik.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Data mentah dan hasil pengolahan terhadap survey kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP dapat dilihat dalam tautan https://bit.ly/3TY188t.

Berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IKK ini. Pada tataran nasional apalagi internasional, tidak tersedia standar yang dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN berbentuk anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Beberapa progres kegiatan yang terpantau telah dilakukan oleh para pegawai Biro HKLN yang menjadi admin PDLN pada triwulan I 2024 adalah:

1. Pemberian layanan seprima mungkin (berpatokan kepada peraturan yang berlaku) pengurusan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara;
2. Pemberian layanan pengurusan paspor dinas; dan
3. Pemberian layanan pengurusan visa.

IK 8 Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
15%	22,86%	120%	25%	21,21%	84,84%	nihil	nihil	Belum

Tabel 18 Realisasi dan Capaian IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	25%	21,21%

Tabel 19 Target dan Realisasi IK Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

IKK Persentase Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2023 hasil pengembangan Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Besar target IKK ini di triwulan I 2024 adalah 15%.

Realisasi kegiatan kerja sama luar negeri ruang lingkup regional dan multilateral oleh Biro HKLN sepanjang triwulan I 2024 adalah sebagai berikut:

Daftar rencana kegiatan forum internasional kerja sama ASEAN, Intrakawasan dan PBB sepanjang tahun 2024 dimana posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan akan diajukan ke dalam forum tersebut dengan tujuan untuk diterima adalah:

A. Kerja sama ASEAN

1. Pertemuan ASWGFi ke-32
2. Pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-16
3. Pertemuan ASEAN Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme ke-31 (30th ASEAN JCM)
4. SEAFDEC SCM ke-56
5. SEAFDEC PCM ke-47
6. FCG/ASSP ke-27
7. BIMP-EAGA (WG on Fisheries) ke-11
8. The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission
9. The 31st Annual Meeting of CCSBT
10. Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17
11. The 21st Regular Session of the WCPFC
12. Penyusunan ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers
13. RPOA IUU CCM

B. Kerja Sama Intrakawasan

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22

3. Pedoman Delri/Kerpos SGOM ATSEA-2
4. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG Ke-23
5. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum IORA WGBE
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024
7. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9
8. RSC 6 ATSEA-2
9. Pedoman Delri/Kerpos MM ATSEA-2
10. Pedoman Delri/Kerpos Pre-SOM/SOM ke-19
11. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen IORA guideline IUUF
12. Pedoman Delri/Kerpos Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan

C. Kerja Sama PBB

1. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management
2. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters
3. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD- 11) di Bangkok, Thailand
4. Sidkom 80
5. Regional Ocean Dialogue
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 36th FAO COFI
7. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum COP 29 UNFCCC
8. CITES 33rd Animals Committee Meeting
9. SOM AIS
10. Dokumen Proposal Project GEF 8 disampaikan kepada GEF

Oleh karena itu, berdasarkan 3 (tiga) daftar di atas, terdapat 35 kegiatan forum internasional kerja sama ASEAN, Intrakawasan dan PBB sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan hasil yang dihimpun dari tim kerja kerja sama regional dan multilateral Biro HKLN, hingga akhir Maret 2024, terdapat 8 kegiatan forum internasional yang telah dihadiri delegasi dari Biro HKLN / Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pada forum tersebut disampaikan posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan. Ke-8 kegiatan tersebut:

1. Kertas Posisi untuk update komitmen lama pada OOC-9
2. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG ke-22
3. Posisi/Presentasi dalam rangka Pertemuan APEC OFWG Ke-23
4. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum G-20 CESWG Brazilia 2024
5. Kertas Posisi untuk usulan komitmen baru pada OOC-9
6. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum 1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management
7. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters
8. Tersusun dengan baik dan diterimanya bahan/dokumen pada Forum Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD- 11) di Bangkok, Thailand

Berdasarkan manual indikator kinerja, realisasi indikator kinerja pada triwulan I 2024 dihitung sebagai berikut

Realisasi %KS Regional dan Multilateral =

(Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional /Jumlah posisi/rekomendasi/prakarsa yang diusulkan) x 100%

Maka, realisasi pada triwulan I 2024 = (8 / 35) x 100% = 22,86%

Target IKK di Triwulan I 2024= 15%

Capaian = (Realisasi / Target) x 100% = (22,86% / 15%) x 100% = 152,40%

Berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku, besar capaian IK ini menjadi 120%.

Raw data atau data dukung serta informasi detail terkait dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional triwulan I 2024 dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/49Lccvx pada sheet 'IK PosisiRekomendasi'. Realisasi IK ini memenuhi target dengan indikator kuantitas yaitu capaian sebesar 120%. Faktor penyebab keberhasilan pemenuhan target adalah terjadi tidak terjadinya lagi kekurangteliJan dalam pemecahan target IK mulai triwulan I sampai triwulan IV 2024. Oleh karena itu, dibandingkan dengan realisasi dan capaian untuk IK yang sama di periode triwulan I 2023, terjadi kenaikan realisasi dan capaian.

Akan tetapi, IK ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/KepSJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IK ini. IK ini tidak memiliki standar nasional yang bisa dijadikan acuan, oleh karena itu tidak bisa dilakukan pembandingan. Pencapaian target IKK ini sepenuhnya didanai oleh anggaran Biro HKLN dan didukung penuh oleh sumber daya manusia Biro HKLN, oleh karena itu Jdak terjadi inefisiensi sumber daya. Kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan lengkap dengan data dukung.

IK 9 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

Triwulan I 2023			Triwulan I 2022			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
25%	21,21%	84,84%	IKK Baru	IKK Baru	IKK Baru	nihil	nihil	Belum

Tabel 20 Realisasi dan Capaian IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 21 Target dan Realisasi IK Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Indikator Kinerja Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan merupakan Indikator Kinerja Biro HKLN yang baru menjadi tanggung jawab Biro HKLN di triwulan II 2023 hasil pengembangan dari Indikator Kinerja di tahun/tahun-tahun sebelumnya yaitu 'Persentase dokumen yang diterima/ditindaklanjuti dalam kerangka kerja sama'. Tidak ada ditetapkan besar target untuk IK untuk periode triwulan I 2024.

Oleh karena itu, capaian IK ini tidak tersedia karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target triwulan I 2024. Pengukuran IK ini akan dilakukan pada triwulan atau beberapa triwulan berikutnya, sebagaimana hal yang sama terjadi pada tahun 2023. Fakta ini menjelaskan mengapa di triwulan I tahun 2024 tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama. Meskipun belum ada realisasi dan capaian IK dalam laporan ini tetap disampaikan bahwa Biro HKLN hendaknya dalam kondisi siap sedia untuk menyelesaikan kegiatan terkait IK ini sebaik baiknya. Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia.

IK 10 Persentase penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2023			Triwulan I 2022			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 22 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2023

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Sebagaimana tercantum dalam di atas, untuk triwulan I tahun 2023 belum ada hasil realisasi dari pengukuran IKK Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada triwulan I Tahun 2023. Begitu juga dengan capaiannya karena selain belum adanya realisasi untuk IKK ini juga tidak ada target yang ditetapkan untuk triwulan I.

Pengukuran IK ini bersifat tahunan, sama seperti tahun/tahun-tahun sebelumnya. Fakta ini yang menjelaskan di triwulan I tahun 2022 juga tidak ada realisasi untuk Indikator Kinerja yang sama. Meskipun belum ada realisasi dan capaian karena merupakan IKU tahunan, dalam laporan ini tetap disampaikan kondisi agar Biro HKLN dalam kondisi siap sedia untuk menyelesaikan laporan temuan BPK yang mungkin baru muncul di triwulan II atau III atau IV tahun 2023. Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia

IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 24 Realisasi dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja ini belum tersedia di Triwulan I tahun 2024. Demikian juga dengan targetnya, sehingga capaian IKK ini di triwulan I 2023 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2023 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan.

Oleh karena semakin mendekatnya waktu pelaksanaan pengukuran Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Biro Perencanaan, maka pada triwulan-triwulan berikutnya di tahun 2023 dapat direkomendasikan dan dilaksanakan pengintensifan koordinasi internal Biro HKLN dalam rangka melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan dengan berkoordinasi serta menjalin kerja sama yang baik dengan Biro Perencanaan dan bersinergi dengan semua pihak dalam menyediakan solusi apabila ditemukan isu dan masalah yang menghambat proses bisnis pencapaian target kinerja ini. Tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2024.

IK 12 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

Tabel 26 Realisasi dan Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 27 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Nilai IP ASN di KKP diungkapkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pemerintah KKP secara berkala dan perkembangan nilainya dapat dipantau melalui tautan http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn#/ip-asn/eselon. Sesuai dengan informasi tersaji dalam tabel di atas, IK ini belum memiliki realisasi untuk triwulan I tahun 2024. Hal serupa berlaku pada triwulan I tahun 2023, karena pengukuran IK ini bersifat semesteran. Pada akhir triwulan II Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pemerintah direncanakan akan menerbitkan IP ASN setiap unit kerja di semua lingkup Sekretariat Jenderal KKP.

Oleh karena bersifat semesteran maka tidak ada penetapan target tertentu untuk IKK ini pada triwulan I 2023 sehingga otomatis belum ada persen capaiannya. Sedangkan target akhir tahun renstra untuk IKK ini adalah 76 dan tidak ada standar nasional yang bisa dirujuk Biro HKLN sebagai pembanding dalam kinerja Indeks Profesionalitas ASN. Tidak diperoleh informasi resmi adanya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan pencapaian target IKK ini sepanjang periode triwulan I 2024.

IK 13 Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
94%	133%	120,00%	92%	100%	108,70%	100%	nihil	Belum

Tabel 28 Realisasi dan Capaian IK Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Target, realisasi dan capaian atas IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar pada triwulan I tahun 2024 dan progress kinerja IKK ini jika dibandingkan dengan perolehan kinerja di tahun sebelumnya dapat dilihat pada kedua tabel di atas. Berdasarkan arahan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal yang notabene merupakan penanggung jawab penghitungan IK ini di KKP, untuk triwulan I tahun 2024 ditetapkan targetnya sebesar 94%. Hasil penghitungan yang diumumkan Pusat Data, Statistik dan Informasi menunjukkan bahwa Biro HKLN berhasil meraih realisasi sebesar 133%. Dengan realisasi tersebut maka capaian dihitung oleh aplikasi kinerjaku menjadi 120,00%. Hal ini berarti bahwa kinerja Biro HKLN melampaui target Triwulan I tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam tabel 24 di atas, target renstra IK ini adalah 94% dan jika mengacu kepada target akhir tahun renstra maka Biro HKLN kemungkinan besar akan dapat memenuhinya.

IK Persentase Unit Kerja BHKLN yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar tidak memiliki standar nasional. Perolehan realisasi dan capaian Biro HKLN untuk nilai IK ini pada tahun triwulan I 2024 di lingkup Sekretariat JJenderal memosisikan Biro HKLN sebagai salah satu unit kerja dengan performa terbaik. Kondisi ini hendaknya tetap memotivasi Biro HKLN untuk meningkatkan kinerjanya terkait IK ini di triwulan-triwulan berikutnya sehingga selalu memperoleh nilai 100% dan mempertahankan peringkatnya yaitu terbaik atau masuk ke dalam kelompok terbaik. Tidak diketahui adanya berita resmi terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya Biro HKLN lainnya dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini sepanjang periode triwulan I 2024.

IK 14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
100%	100%	100%	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 31 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri pada Triwulan I tahun 2024 adalah 100%. Demikian juga dengan target sebesar 100% maka capaian IK ini di triwulan I 2024 menjadi 100%. Hal yang serupa tidak berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2023 karena pada periode yang sama di tahun 2023 belum ada realisasinya. Oleh karena telah ada realisasi di triwulan I 2024 maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target akhir tahun yang ditetapkan Renstra Sekretariat Jenderal. Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Tidak termonitor keberadaan indikasi bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya Biro HKLN dalam bentuk anggaran, sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dalam segenap kegiatan untuk mendukung pencapaian target IK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2024.

IK 15 Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2024			Triwulan I 2024			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	100%	nihil	Belum

Tabel 32 Realisasi dan Capaian IKK Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kedua tabel di atas, realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Biro HKLN pada periode Triwulan I 2024 belum tersedia. Demikian juga dengan targetnya, sehingga capaian IKK ini di triwulan I 2024 belum dapat dihitung. Hal yang serupa berlaku dengan kondisi di triwulan I tahun 2023 karena penghitungan Indikator Kinerja ini bersifat tahunan tepatnya di akhir tahun anggaran. Oleh karena belum ada realisasi di triwulan I 2024 maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target akhir tahun yang kebetulan belum ditetapkan di dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024. Tidak ada standar nasional yang bisa dijadikan acuan untuk komparasi atas realisasi yang diperoleh Biro HKLN. Sangat diyakini bahwa tidak ada indikasi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian target IKK ini secara langsung dan tidak langsung sepanjang periode triwulan I 2024.

IK 16 Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	nihil	nihil	Belum

Tabel 34 Realisasi dan Capaian IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 35 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Triwulan I Tahun 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2024, belum ada baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IKK Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri. Hal ini dikarenakan penghitungan IKK yang bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IKK ini. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal (Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 17/Kep-SJ/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2020-2024) belum memuat besar target akhir periode menengah untuk IKK ini. Sedangkan pada tataran nasional, tidak tersedia standar yang diacu Biro HKLN sebagai pembanding. Tidak ada informasi bahwa telah terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN (anggaran dan pegawai). Progres akhir triwulan I 2024 pelaksanaan IK ini adalah dilaksanakannya rapat dan berbagai pertemuan untuk pematangan konsep dokumen legal.

IK 17 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Mendapatkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Triwulan I 2024			Triwulan I 2023			Target Renstra	Standar Nasional	Realisasi/ Renstra
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
nihil			nihil			nihil	nihil	Belum

Tabel 36 Realisasi dan Capakan IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Triwulan I 2024

2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tw I 2017 s.d. 2023

Dalam tabel di atas terlihat jelas bahwa pada triwulan I tahun 2024, belum tersedia baik realisasi maupun capaian Biro HKLN untuk IKK Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Hal ini dikarenakan penghitungan IK bersifat tahunan. Demikian juga dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, belum ada hasil penghitungan IKK ini karena Indikator Kinerja ini baru ada di tahun 2024. Berdasarkan peraturan terkait yang berlaku, belum tersedia target tahun terakhir pada rencana strategis untuk IK ini. Pada tataran nasional tidak tersedia standar dapat diacu Biro HKLN sebagai pembanding atau sebagai rujukan. Tidak ada laporan bahwa terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya Biro HKLN baik anggaran maupun sumber daya manusia. Beberapa progress kegiatan yang diperkirakan telah rampung pada triwulan I 2024 adalah:

1. Rapat pengarahan Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kepala Biro HKLN; dan
2. *Drafting* dokumen Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari 17 IK tanggung jawab Biro HKLN di tahun 2024, IK yang pada triwulan I 2024 telah memiliki realisasi adalah sebagai berikut (dilengkapi kode IKU berdasarkan aplikasi kinerjaku):
   a. IKSK.04, Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan, realisasinya sebesar 94,44%. Target IK ini adalah 89% maka capaiannya menjadi 106,11%;
   b. IKSK.05, Nilai kepuasan terhadap layanan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi IKU sebesar 91,81% dengan besar target yaitu 88%. Oleh karena itu capaian IK berdasarkan penghitungan matematis adalah 104,33%;
   c. IKSK.06, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti, target 15%, realisasi 50,00% maka realisasi berdasarkan aplikasi kinerjaku menjadi 120%;
   d. IKSK.07, Persentase kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, target IK ini adalah 88% sementara realisasi IK mencapai angka 88,61% sehingga capaiannya adalah 100,69%;
   e. IKSK.08, Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidan kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional, target 15%, realisasi 22,86%. Capaian IK ini berdasarkan penghitungan oleh aplikasi kinerjaku adalah 120%;
   f. IKSK.13, Persentase Unit Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, realisasinya sebesar 133%. Dengan target IKU sebesar 94% maka aplikasi kinerjaku menghitung capaian untuk IK ini sebesar 120%, dan
   g. IKSK.16, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dengan realisasi sebesar 100 %. Target IKU ini untuk dipenuhi adalah 100% sehingga capaiannya menjadi 100%.
2. Pemenuhan target IKK Biro HKLN di triwulan I 2024 diyakini melalui pendayagunaan anggaran melalui penyerapan APBN KKP yang dialokasikan untuk Biro HKLN dengan efektif dan efisien.

Saran

Memperhatikan hasil dan analisis atas capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab di atas dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro HKLN triwulan berikutnya tahun 2024 beberapa hal di bawah ini dapat menjadi bahan pertimbangan:

1. Biro HKLN seyogyanya terus memegang teguh dan melanjutkan etos kinerja prima yang sudah ditunjukkan selama triwulan I tahun 2024. Beberapa etos kerja dan kinerja sebagai hasil dari implementasi nilai budaya kerja Biro HKLN arahan pimpinan adalah disiplin, kebersamaan, keterbukaan, proaktif, integritas, responsif, berorientasi masa depan dan tanggung jawab;
2. Memperkuat koordinasi di lingkup internal Biro HKLN dan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu para mitra kerja sama Biro HKLN guna mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pencapaian target semua IKU; dan
3. Terkait dengan penyerapan anggaran, perlu ditekankan untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan sinkronisasi waktu pelaksanaan penyerapan anggaran dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kepastian atas efisiensi penganggaran kegiatan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Biro HKLN 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Prabowo
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Rudy Heriyanto Adi Nugroho	Ari Prabowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Kerja Sama Internasional	1	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	96,9
		2	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (nilai)	93,3
		3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP (nilai)	94
		4	Persentase efektifitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (persen)	89
		5	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (nilai)	88
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Kerja Sama Internasional	6	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (persen)	95
		7	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (persen)	93
		8	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan KKP (persen)	88
		9	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (persen)	100
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	84
		11	Indeks Profesionalitas ASN Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	85
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		13	Persentase Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	100
		15	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (persen)	95
		16	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (persen)	100
		17	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	75

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	7.500.000.000
2	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	29.986.550.000
Total Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024		37.486.550.000

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Ari Prabowo